

Perekonomian seharga cabai

Tidak mengejutkan ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan perkembangan indeks harga konsumen Februari mengalami pelambatan yang disumbang deflasi bahan pangan, sehingga laju inflasi bulan lalu menjadi 0,13%.

Dengan pelambatan laju inflasi ini, maka ekspektasi inflasi yang sejak akhir tahun lalu menjadi momok sebagian kalangan—terutama bank sentral yang merespons dengan kenaikan BI-Rate—dapat lebih dikelola, paling tidak untuk masa jangka pendek ini.

Harga pangan ditengarai sebagai salah satu penyebab pelambatan indeks inflasi yang tercatat menjadi 6,84% dibandingkan Januari sebesar 7,02%. Selain itu, penurunan harga juga berkaitan dengan berakhirnya siklus libur akhir tahun yang memuncak sejak Desember hingga Januari.

Kita semua pasti merasakan perekonomian bergerak dengan dinamis sejak tahun lalu, sebelum harga minyak dunia dan harga komoditas meroket. Namun, dinamika ekonomi itu diiringi tekanan kenaikan laju inflasi.

Karena itu, pengumuman BPS kemarin sedikit melegakan dan berharap laju inflasi tahun ini setidaknya dapat tertahan. Namun demikian, potensi ancaman inflasi perlu tetap diwadai menyusul perkembangan terakhir kondisi pangan kita yang mengindikasikan dalam situasi kritis alias tidak aman.

Kita tentu semakin menyadari bahwa gambaran indeks harga konsumen itu menambuh keyakinan bahwa sumber inflasi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berasal dari aktivitas ekonomi yang riil, bukan dari gejolak moneter.

Sudah menjadi pemahaman luas di kalangan ekonom bahwa perekonomian Indonesia yang memiliki potensi melaju kencang juga menyimpan ancaman besar untuk mudah mengalami pemanasan alias *overheating*.

Penyebab utama adalah *lack of infrastructure*, yang keberadaannya dibutuhkan sebagai pelumas roda perekonomian supaya tidak mudah panas. Dalam kondisi serba kekurangan infrastruktur seperti sekarang ini, setiap ekonomi melaju lebih kencang, selalu diiringi dengan kenaikan inflasi.

Oleh sebab itu, pengelolaan distribusi dan logistik yang lebih baik akan sangat membantu dalam upaya mengelola ekspektasi inflasi ini. Itu berarti realisasi proyek-proyek infrastruktur menjadi keharusan mutlak, agar jalur distribusi dan logistik di seluruh Indonesia bisa lebih baik.

Sepintas tampak jauh sekali hubungan atau mengaitkan inflasi dengan infrastruktur. Namun potret perekonomian kita memang unik dan fakta yang terjadi kerap menjadi bahan olak-olok bahwa harga cabai menentukan perekonomian nasional.

Bukan karena volume produksi dan konsumsi cabai yang besar, tetapi pola produksi dan distribusi cabai yang mengakibatkan lonjakan harga sangat *rijomplang* dari waktu ke waktu dan musim ke musim.

Cabai sekadar contoh, tetapi membiarkan jalur distribusi merana seperti sekarang akan kian menjadi bom waktu yang mematikan. Perekonomian kita akan semakin terkekang oleh inefisiensi; tidak hanya boros dalam penggunaan modal tetapi juga boros dalam konsumsi waktu.

Hak tanpa perbaikan

Dalam kasus perebutan perbatasan negara 3 tahun lalu, Mahkamah Agung memutuskan para tahanan di Guantanamo Bay, Kuba, yang bukan warga negara Amerika memiliki hak konstitusional '*habeas corpus*'. Ini memberi mereka hak untuk memiliki putusan dari hakim federal apakah penahanan mereka adalah ilegal.

Sementara itu, keputusan 5-ke-4 yang dikenal sebagai kasus *Boumediene* adalah penyangkalan dari strategi Bush untuk memindahkan para tahanan di luar wilayah AS sehingga konstitusi tidak akan berlaku.

Pengadilan Banding AS atas Distrik Columbia, satu-satunya daerah di mana para tahanan dapat menentang penahanan mereka, telah secara dramatis membatasi *Boumediene* yang berkuasa.

Dalam kasus *Kiyemba* baru-baru ini, lima orang Uighur atau tahanan Muslim China, mengajukan banding kepada MA untuk mendukung permohonan mereka agar hakim pengadilan federal dapat membebaskan mereka.

• *International Herald Tribune*, 28 Februari

Debat sebelum ekspor senjata

Jepang dan Amerika Serikat mencoba untuk membuka jalan bagi penjualan pertama senjata yang dikembangkan bersama untuk negara-negara dunia ketiga.

Senjata tersebut adalah pencegat rudal lanjutan untuk pertahanan rudal balistik (BMD). Kedua negara memulai riset bersama dan pengembangan pencegat pada 1999, setelah Korea Utara menembakkan sebuah rudal balistik di atas Jepang pada 1998.

Jepang telah bertugas mengembangkan empat komponen, termasuk kerucut hidung untuk melindungi motor hulu ledak dan roket. Pengembangan rudal dijadwalkan akan selesai pada 2014.

Pada Januari, Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa mengatakan kepada rekannya dari AS, Robert Gates, bahwa Pemerintah Jepang akan membuat keputusan pada akhir tahun mengenai kebijakan tentang penjualan pencegat ke negara-negara ketiga.

• *The Asahi Shimbun*, 28 Februari

Dampak pembatasan subsidi BBM

Pemerintah gagal merasionalkan dana nonbujeter

OLEH SUGIYONO MADELAN
Peneliti Indef, Jakarta

Kebijakan pembatasan subsidi BBM adalah kebijakan berbasis kuota. Dengan bekal kuota subsidi BBM sebesar 38,6 juta kiloliter, maka kuota tersebut hendak didistribusikan kepada masing-masing pelaku ekonomi.

Selisih dari kuota adalah dampak negatif yang diperkirakan oleh pemerintah sebagai pil pahit penyehatan atas rasionalisasi konsumsi BBM fosil.

Asumsi pemerintah adalah pelaku ekonomi Indonesia mempunyai ketahanan ekonomi yang melebihi batas normal. Internasionalisasi harga BBM Indonesia sesungguhnya merupakan persoalan Pertamina yang gagal keluar dari belenggu pengilangan minyak di Singapura, kecuali Balongan. Kegagalan tersebut seolah-olah di atas kertas terjadi defisit neraca perdagangan BBM Indonesia, yang sesungguhnya margin keuntungan oleh manuver membiarkan ketergantungan naif itu merupakan isu sumber rente ekonomi yang memakmurkan sebagian WNI di NKRI ini. Horor kontrak bagi hasil Pertamina berimplikasi seolah membiarkan terjadi isu politik memiskinkan Indonesia yang kaya sumber daya alam ini.

Jika belenggu informasi tidak simetris di atas dapat diatasi, BBM fosil yang diusulkan sejak 1985 akan habis pada 2011 itu terbantahkan dengan sendirinya. Isu BBM fosil habis kemudian bergeser ke 2025. Belenggu asumsi ekonomi makro dalam menyusun APBN yang bergan-

tung dinamika ekonomi global juga menimbulkan horor, ketika harga BBM di pasar internasional meningkat melebihi batas asumsi harga minyak dalam APBN.

Pengeluaran APBN tertekan oleh biaya belanja pegawai yang sebesar 21,93%, sementara itu pegawai PNS dan TNI/Polri me-

ganggu rasionalitas migrasi pegawai menjadi karyawan swasta dan wira-swasta.

Pembayaran bunga utang dalam



BISNIS/ILHAM NESABANA

mengalami kesulitan hidup manakala hanya mengandalkan gaji dan insentif formal, namun menjadi pegawai pemerintah masih menjadi pilihan rasional mayoritas pegawai. Pemerintah gagal merasionalkan dana nonbujeter sebagai instrumen kesejahteraan yang legal, sehingga ketenteraman batin sebagai pegawai sesungguhnya dalam lubuk hati terdalam itu kurang sempurna. Persoalan kepastian hidup sebagai karyawan swasta pada hari tua dan usia tua tanpa pensiun, serta potensi siklus perusahaan swasta yang sewindu itu, meng-

ganggu rasionalitas migrasi pegawai menjadi karyawan swasta dan wira-swasta. Pembayaran bunga utang dalam negeri lebih besar dibandingkan luar negeri, namun pemerintah tidak mencantumkan pembayaran pokok utang, sehingga informasi pembayaran bunga utang saja mengesankan utang pemerintah tidak akan pernah lunas. Masalah-masalah di atas, yakni belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, telah menekan subsidi.

Melanggar UU

Meskipun subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati meningkat sebesar 4,4%, namun pemerintah akan memberlakukan

pembatasan subsidi BBM yang seolah tidak teragendakan dalam APBN 2011. Konsumsi BBM sebesar 42 juta kiloliter, namun subsidi direncanakan sebesar 38,6 juta kiloliter. Akibat perencanaan APBN yang buruk ini, maka manuver pembatasan subsidi BBM ini berpotensi melanggar UU APBN 2011.

Selisih kuota BBM bersubsidi yang menimbulkan selisih kenaikan harga sebesar Rp3.300 per liter akan berpotensi mengguncang industri skala besar dan sedang pada subsektor industri barang galian bukan logam, gelas, porselein, tanah liat, semen, kapur dan gips, pesawat terbang, tekstil, permadani, kertas dan barang dari kertas, serta barang dari batu bara, karena komponen BBM, listrik dan gas lebih besar dari 10%. Demikian pula untuk sektor perdagangan besar dan eceran skala perusahaan menengah dan besar, yang secara agregat pangsa biaya bahan bakar dan pelumas sebesar 14,88%.

Industri pengolahan skala mikro dan kecil kode industri 15 sampai 19, dan 26 akan terkena dampak buruk kebijakan pembatasan subsidi BBM. Dampak berantai kebijakan pembatasan

subsidi BBM akan terasa pada populasi 15,16% industri pengolahan skala mikro dan kecil akibat akumulasi kesulitan BBM, listrik, gas dan air, terutama bahan baku, transportasi, dan

membayar upah buruh. UMKM yang identik dengan ekonomi rumah tangga, di mana populasi UMKM di Indonesia sebanyak 99,8% dari pelaku ekonomi dan tersentralisasi di Jabodetabek, akan terbebani pula.

Sebab, komponen pengeluaran rata-rata rumah tangga di DKI Jakarta pada 2007 saja sebesar 27,02% adalah untuk membayar biaya perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Sebanyak 19,66% merupakan pangsa biaya ekonomi rumah tangga untuk membayar biaya transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Terjadi pengondisian kejatuhan kepercayaan publik kepada pemerintah menggunakan taktik Marxisme Stalin Lenin. Rencana April MOP, ritual peringatan hari buruh Mayday, serta horor informasi gagal panen yang bobotnya sama dengan embargo pangan, yang ditunjukkan kegagalan panen di Rusia sebesar 40% akibat perubahan iklim global, maka gejala spekulasi di pasar sekunder efektif mem-floatkan pasar primer.

Karena absurditas informasi di atas, ketahanan nasional Indonesia hendaknya tidak perlu mengikuti pembentukan virtual Perang Dunia II bidang ekonomi yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tunisia, Mesir, nanti Libia, Bahrain, Etiopia, dan lain-lain.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi *Bisnis Indonesia* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis

Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimbanya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.

“ VERBATIM ”

Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

Mengubah jalur busway

Dalam persoalan kemacetan lalu lintas dan rumitnya menertibkan pengguna kendaraan bermotor memasuki jalur busway, seorang mahasiswa saya melontarkan ide menarik yakni membuat jalur busway berlawanan arah.

Selama ini jalur busway mengikuti arah sebagaimana umumnya jalur lalu lintas diterapkan. Hal ini mengundang pengguna jalan nonbusway melakukan ‘penyusupan’ ke jalur busway akibat kemacetan yang dideritanya di jalur biasa. Jalur busway terlihat lenggang, lancar dan tidak memiliki pembatas memadai membuat sang ‘penerobos’ jalur dengan mudahnya memanfaatkan jalur ini.

Walaupun dilakukan sterilisasi oleh aparat terkait, tetap saja kebiasaan menyimpang itu terjadi khususnya saat aparat yang bertugas mensterilisasi jalur busway tidak berada di tempat. Alhasil para pengguna jalur nonbusway yang bandel itu bermain ‘kucing-kucingan’ dengan aparat. Mengemang sangat sulit mengubah perilaku pengendara lalu lintas jika sistemnya kurang tegas dan atau memiliki celah-celah yang dimanfaatkan untuk ketidakbenaran perilaku berlalu lintas itu.

Oleh karena itu, kiranya dengan mengubah jalur busway berlawanan arah, fenomena pengendara yang menerabas jalur busway akan berpikir dua kali karena akan berhadapan dengan busway tersebut. Namun, memang di awalnya diperlukan pembiasaan, juga perubahan letak pintu masuk-keluar busway.

Cara lain yang mungkin saja dapat dilakukan adalah dengan meninggikan pembatas jalur busway dengan jalur lainnya, sehingga jalur busway akan sulit diterobos oleh mobil-mobil biasa yang jumlahnya di Jakarta memang mendominasi jalan raya.

Setiap cara tentu memiliki konsekuensi sendiri. Sebagaimana selama ini diterapkan cara sterilisasi yang ternyata sampai sekarang masih belum efektif. Mengubah perilaku manusia memang memusingkan kepala selama kesadaran itu belum muncul. Akan tetapi, kesadaran dapat saja ‘dipaksa’ melalui sistem dan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen.

Aries Musnandar
Staf Pengajar FE Universitas Brawijaya,
Malang

Setuju pembatasan BBM bersubsidi

Pembatasan BBM bersubsidi merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah untuk menyempitkan subsidi pada yang berhak, sebab selama ini pemerintah harus menanggung beban hingga ratusan triliun rupiah. Bisa kita bayangkan seandainya beban tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik berupa BLT, PNPm, KUR maupun Jamkesmas.

Selama ini yang menikmati BBM bersubsidi justru mereka yang kehidupan ekonominya lebih baik, perbandingannya 150 kali lipat. Artinya sangat jelas sekali selama ini subsidi BBM salah sasaran.

Memang wacana pembatasan subsidi BBM ini mendapatkan reaksi yang beragam, ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Secara pribadi saya mendukung pembatasan subsidi BBM ini.

Untuk suksesnya program pembatasan BBM bersubsidi tersebut, pemerintah melakukan berbagai sosialisasi, namun sosialisasi ini dianggap tak efektif dan ada berbagai kalangan yang justru menginginkan harga BBM bersubsidi ini dinaikkan.

PEMBAKA MENULIS

Alasannya agar pemerintah tidak perlu menanggung beban yang berlebihan. Tidak berjalannya sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi kepada para pengendara umum dan pengelola SPBU membuat opsi pembatasan BBM bersubsidi tidak populer di kalangan sopir kendaraan umum dan juga pengelola SPBU.

Mereka pun meminta pembatasan BBM ditiadakan dan diganti dengan menaikkan harga premium. Bisa kita bayangkan jika harga premium dinaikkan, sama saja pemerintah membunuh rakyat kecil secara perlahan. Kenaikan harga premium akan membawa imbas kenaikan harga bahan pokok, antara premium dengan bahan pokok ibarat mata uang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Apalagi premium digunakan kendaraan umum, jika premium naik biaya transportasi akan ikut naik dan kesengsaraan baru akan menyelimuti rakyat kecil.

Memang kita ketahui di tengah impitan tingginya harga minyak dunia yang disebabkan oleh anomali iklim dan berbagai kerusuhan/krisis politik di berbagai negara Timur Tengah telah memengaruhi harga minyak dunia.

Namun, ada sesuatu yang melegakan bati dengan pernyataan dari pemerintah yang mengaku tak mau gegabah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Alasannya, kenaikan BBM subsidi ini dikhawatirkan bisa menekan rakyat miskin dan mendorong inflasi.

Saya berharap kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan tetap melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Novianti Christina
Jl. Batang Hari
Jakarta

Kritik, saran, dan komentar bisa disampaikan melalui surat ke redaksi *Bisnis Indonesia* atau e-mail: redaksi@bisnis.co.id

Bisnis Indonesia

Tim Pengembangan Redaksi: Adhitya Noviard, Y. Bayu Widagdo. **Manajer Sekretariat Redaksi:** Indah Sutriningsih. **Asisten Redaktur:** Algotho Putranto, Andy T. Kurniadi, Aprika Rani Hernanda, Arif Pitoyo, Bambang Supriyanto, Bastanul Siregar, Elsa Refianti, Erna Sari Uliana Girsang, Fahmi Achmad, Gajah Kusumo, Hendra Wibawa, Junaldi Halik, Lutfi Zaenudin, Moh. Fatkhul Maskur, Muhammad Munir Halik, Nana Oktavia Musilana, Rahayuningsih, Sylviana Pravitza R.K.N., Taufik Wisatno, Tommy Sasongka, Tri Dirgantara Pamenan, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus. **Staf Redaksi:** Achmad Arif, Afriyanto, Agus Supriadi, Anggi Oktarina, Anugerah Peraksa, Arif Gunawan Sulistyono, Arif Novianto, Yuwono, Asep Dadan Muhanda, Bambang P. Jatmiko, Berliana Elisabeth, Dewi Astuti, Dierna Lestari, Elviani Harifaningsih, Erwin Tambunan, Fajar Sidik, Fita Indah Maulani, Gita Arwani Cakti, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hilda Sabri Sulistyono, Irsad, Irvin Avriano, John A. Oktaveri, Linda Teti Silintonga, Maria Yuliana B., Mia Chitra Dinaris, M. Tahir Saleh, Mulia Ginting Munthe, Natalina Kasih Wasiyati, Nurbafti, Nurudin Abdullah, Rahmayulis Saleh, Ratna Ariyanti, Raydon, Reni Effa Hendry, R. Fitriana, Roni Yunianto, Rudi Ariflianto, Sepudin, Siti Nuraisyah Dewi, Stefanus Arif Setiaji, Theresia Diah Wulandari, Tulariji, Yusuf Waluyo Jati. **Perwakilan:** Bali: Smantha Ardiansyah (Koordinator Bali). Bandung: Asep Mh. Mulyana (Manajer), Hillman Hidayat (Asisten Redaktur), Muhammad Sufyan. Makassar: M. Noor Komropt (Manajer), Kwan Men Yon (Asisten Redaktur), Siti Munawaroh (Koordinator Balikpapan). Medan: Melvin A. Sebayang (Manajer), Master Silhotang. Semarang: Edi Barlianto (Manajer). Endot Brilianton, Rahmat Suljanto. Surabaya: Galih Prakoso (Manajer), Marlina A. Jobs (Asisten Redaktur), Bambang Sutedjo (Koordinator P. Jawa Rp17.000/bulan, luar Jawa Rp17.000/bulan. Tarif iklan: Display Rp35.000/mm kolom, berwarna Rp52.000/mm kolom, iklan laporan keuangan Rp21.000/mm kolom, berwarna Rp34.000/mm kolom, baris Rp19.000/minimum 3 baris. ISSN 0215-2045. Surat izin: SK Menpen No. 017/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985, 4 Desember 1985, Anggota SPS No. 116/1985/11/A/2002, terbit 7 kali seminggu.

Pemimpin Umum: Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono. **Wakil Pemimpin Umum:** Ahmad Djauhar. **Pemimpin Perusahaan:** Soebronto Laras. **Wakil Pemimpin Perusahaan:** Haryadi B. Sukamdani. **Pemimpin Redaksi:** Arief Budisuliso. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Linda Tangdialla. **Sekretaris Redaksi:** M. Syahrani W. Lubis. **Redaktur Pelaksana:** Abraham Rungga Mali, Chamdan Purwok, Gung Pangdodo Supranto, Inria Zulfiakar, Neneng Herbwatni. **Redaktur:** Aprilian Herwanan, Budi Prakarsa, Diono Edward, Eries Adlin, Firmans Hidiranto, Firmans Wibowo, Hery Luzuardi, Hery Trianto, Ismail Fahmi, Lahyanto Nadie, Martin Sihombing, M. Rochmad Purboyo, M. Sarwani, M. Yunan Hilmi, Nono Djundjono, Rustam Agus, Setyardi Widodo, Sutarno, Suwanti Oemar, Wisnu Wijaya, Zulrizal.

Manajer Produksi: Andri Trisuda. **Manajer Media Digital:** Deriz Syahpatria Syarif. **Penerbit:** PT Jurnalingdo Aksara Grafika, **Direksi:** Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djauhar, Endy Subiantoro, **Alamat Kantor:** Wisma Bisnis Indonesia, Lt. 5-B, Jl. KH Mas Mansyur No. 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. **Telepon:** (021) 5791023 (hunting). **Faks:** redaksi: (021) 5791025, Pemasaran: (021) 5791024, Perusahaan: (021) 5791028. **Rekening bank:** PT Jurnalingdo Aksara Grafika, BCA cab. Wisma Asia 084-303.757-4; PT Jurnalingdo Aksara Grafika, Bank Mandiri cab. Wisma Bisnis Indonesia 121-009.009999-9; PT Jurnalingdo Aksara Grafika, Bank BNI (\$) cab. Kramat 10528868. **Kantor Perwakilan:** Jawa Timur, Jl. Opak No. 01 Surabaya, Tel. (031) 5670748, Fax. (031) 5675853. Malang, PertoKono Sarangan Jl. Sarangan No. 1a Malang, Tel. (0341) 402727, (0341) 480630, Fax. (0341) 402728. Denpasar, Jl. Suli No. 119 Blok B-3 Denpasar 80233 Telp. 0361-7446604, Fax. (0361) 261067. Jawa Tengah, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. (024) 8442852, Fax. (024) 8454527. Jawa Barat, Jl. Buah Batu No. 46B, Bandung 40261 Telp. (022) 7321627, 7321637, 7321698, Fax. (022) 7321680. Sumatra Utara, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun Jl. Brigjend. Katamso No. 6, Medan, Telp. (061) 4554121/4553035 Fax: (061) 4553042. Riau, Jl. Pepaya No. 42, P. Karam Sukajadi, Pekanbaru 28127. Telp. (0761) 7048307, Fax. (0761) 40335. Batam, Kompleks Ruko Mahkota Raya Blok C No.8 Batam Centre - Batam Telp. (0778) 748 3156 / Fax (0778) 748 3154, Indonesia Timur, Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Telp. (0411) 8114203 Fax: (0411) 8114253. Balikpapan, Balikpapan Superblock, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan Telp. (0542) 7213507, Fax. (0542) 7213508. **Harga langganan:** P. Jawa Rp17.000/bulan, luar Jawa Rp17.000/bulan. **Tarif iklan:** Display Rp35.000/mm kolom, berwarna Rp52.000/mm kolom, iklan laporan keuangan Rp21.000/mm kolom, berwarna Rp34.000/mm kolom, baris Rp19.000/minimum 3 baris. ISSN 0215-2045. Surat izin: SK Menpen No. 017/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985, 4 Desember 1985, Anggota SPS No. 116/1985/11/A/2002, terbit 7 kali seminggu.

Wartawan *Bisnis Indonesia* selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun dari nara sumber berkaitan dengan pemberitaan.